

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK POLRI
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA**

TESIS

OLEH:

DANIEL FEBRIANDI PAKPAHAN

2102190035



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2023

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK POLRI
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

DANIEL FEBRIANDI PAKPAHAN

2102190035



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Daniel Febriandi Pakpahan

NIM : 2102190035

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis Tugas Akhir yang berjudul "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugasakhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 November 2023



Daniel Febriandi Pakpahan

NIM : 2102190035



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK POLRI DALAM
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLDA METRO JAYA

Oleh :

Nama : Daniel Febriandi Pakpahan
NIM : 2102190035
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta 10 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIP/NIDK: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIP/NIDK: 211059/8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 141104/0327096504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 10 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Daniel Febriandi Pakpahan
NIM : 2102190035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul " PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Henry Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Febriandi Pakpahan
NIM : 2102190035
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Tugas akhir : Tesis
Judul : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
POLRI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLDA METRO JAYA.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 November 2023



Daniel Febriandi Pakpahan
NIM : 2102190035

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Magister serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tersayang, Istri tercinta dr. Amelia, Orang Tua dan Mertua yang sudah sangat sabar memberikan dukungan penuh dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar serta boru hasian Winona Abigail Pakpahan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. dan Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
6. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis dihari-hari yang akan datang.
7. Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di UKI.
8. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana MIH UKI 2021, khususnya kelas J dan kelas Pidana.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 10 November 2023



Daniel Febriandi Pakpahan
NIM : 2102190035

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Secara Praktis	12
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.5.1. Tujuan Umum:.....	13
1.5.2. Tujuan Khusus:.....	14
1.6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	14
1.6.1. Kerangka Teori.....	14
1.6.2. Kerangka Konsep	17
1.7. Metode Penelitian.....	20
1.7.1. Jenis Penelitian	20
1.7.2. Sumber Data Penelitian	20
1.7.3. Pendekatan Penelitian.....	23
1.8. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Tinjauan Teori-Teori.....	28
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	28
2.1.2. Teori Efektifitas Hukum	30
2.2. Tinjauan Mengenai Restorative Justice	33
2.3. Tinjauan Mengenai Pidana.....	36
2.3.1. Pengertian Pidana	36
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.3.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	42
2.4. Tinjauan Mengenai Penyalahgunaan Narkotika	46
2.5. Tinjauan Mengenai Pidana.....	47
2.5.1. Pengertian Narkotika	47
2.5.2. Peraturan Hukum Mengenai Narkotika Di Indonesia	52
2.5.3. Golongan Narkotika	65
2.5.4. Jenis-Jenis Narkotika Yang Sering Disalahgunakan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	67
 BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN	
3.1. Restorative Justice Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika	74
3.2. Pengaturan Hukum Restorave Justice Pada Tingkat Penyidkan di Kepolisian.....	78
3.3. Bentuk Penerapan Restorative Justice	88
3.3.1. Persyaratan Khusus Restorative Justice	92
3.3.2. Persyaratan Umum Restorative Justice	93
3.3.3. Syarat Restorative Justice Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	95
3.3.4. Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan.....	95
3.4. Minimal Barang Bukti Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .	98
3.5. Analisis Penulis.....	102

BAB IV KENDALA DAN PELUANG RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK	
4.1. Data Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021-2023	107
4.2. Mekanisme dan Syarat Penerapan Pendekatan Restorative justice Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Pada DITRESNARKOBA di Wilayah POLDA METRO JAYA	109
4.3. Kendala dan Peluang Penerapan Restorative justice	113
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran	137
 DAFTAR PUSTAKA	139



ABSTRAK

Restorative Justice adalah suatu konsep yang dilahirkan atau pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum yang lebih maju. Adapun satu-satunya peraturan yang setingkat dengan undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada umumnya disebut dengan istilah “diversi”. Selain itu, aturan hukum yang dapat ditemukan mengenai konsep *restorative justice* dapat dilihat dalam aturan yang hierarkinya dibawah undang-undang yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang-undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak. Terdapat 2 rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana kewenangan penyidik polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, dan (2) Apakah terdapat kendala dan peluang dalam penerapan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak. Pada Rumusan Masalah pertama penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum yaitu untuk melihat apakah aturan-aturan perundang-undangan dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak telah sesuai dengan asas perlindungan hukum dan kedua penulis menggunakan teori efektifitas yaitu dengan melihat apakah aturan hukum tersebut atau produk hukum mengenai keadilan restoratif penyalahgunaan narkoba sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu: (1) Data primer berupa wawancara dan pengisian kuisioner, (2) Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder (data kepustakaan).

Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu: Penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak pada tingkat penyidikan di kepolisian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terlebih dahulu, yaitu penyalahguna bagi diri sendiri, korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak lapor yang nantinya akan menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Kemudian diikuti dengan aturan pelaksanaannya atau aturan turunannya melalui Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perkap No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan RJ yaitu: Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, Penyelidikan dan Penyidikan.

Restorative justice bukan berarti bahwa pelaku tidak akan mendapat hukuman, melainkan bahwa hukuman tersebut dapat lebih fokus pada memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan Adapun peluangnya yaitu *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang berpotensi efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak, dengan fokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan di masa depan dengan menggunakan pendekatan holistik, pertumbuhan pribadi, mengurangi kekriminalisasi, menggerak masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberantas narkoba melalui sosialisasi-sosialisasi dari pihak kepolisian terhadap publik, pemulihan korban dan masa depan korban (anak), pencegahan sekunder serta mengurangi kapasitas lapas dan mempersingkat waktu pemeriksaan pelaku, dikarenakan proses *restorative justice* di tingkat kepolisian dilakukan secara non litigasi sehingga tidak membuang-buang waktu.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyalahguna Narkoba, Anak.



ABSTRACT

Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 08 of 2021 Concerning Handling of Criminal Acts Based on Justice restorative . Legal protection for children in conflict with the law in the criminal justice system is regulated in international legal instruments and national legal instruments. In Indonesia, in dealing with cases of children in conflict with the law, the government makes special laws, namely by issuing Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This law prioritizes restorative justice, namely in the form of an obligation to seek a transfer process in the child case settlement system. There are 2 formulations of the problem in this thesis, namely: (1) How are police disclosures in cases of Narcotics violations by children, and (2) are there obstacles and opportunities in the application of restorative justice in cases protected by Narcotics by children. In the first problem formulation, the authors use the theory of legal protection, namely to see whether the statutory rules in cases of narcotics violations by children are in accordance with the principle of legal protection, and the second, the authors use the theory of effectiveness, namely by looking at whether the legal rules or legal products regarding restorative justice robbing Narcotics is going well or not.

This research is a normative juridical research supported by empirical juridical research. The data used are: (1) Primary data in the form of interviews and questionnaires, (2) Secondary data in the form of primary and secondary legal materials (library data).

From the research results it can be obtained, namely: The application of restorative justice in cases of narcotics abuse by children at the level of investigation in the police must be in accordance with the provisions of Article 127 of the Narcotics Law first, namely abusers themselves, victims of abusers and narcotics addicts who do not report later will undergo medical rehabilitation and/or social rehabilitation. This is then followed by implementing regulations or derivative regulations through Perkap Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice. in accordance with the provisions of Article 2 Paragraph (1) of Perkap No. 8/2021 Concerning the Handling of Crimes Based on the RJ, namely: Carrying out the functions of criminal investigation, Investigation and Investigation. Restorative justice does not mean that the perpetrator will not receive punishment, but that the punishment can focus more on recovering the damage caused by the crime and the opportunity is that restorative justice can be a potentially effective alternative in dealing with drug abuse by children, with a focus on rehabilitation, social reintegration, and prevention in the future using a holistic approach, personal growth, reducing criminalization, inviting the public to participate in eradicating narcotics through socializations from the police to the public, recovery of victims and future victims (children), secondary prevention and reducing prison capacity and shorten the time for examining perpetrators, because the restorative justice process at the police level is carried out in a non-litigation manner so it does not waste time.

KEYWORDS: *Restorative Justice, Narcotics addict, Children*